

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Siap Bangun Stadion BMW

Mantan Wagub Prijanto Ingatkan Anies-Sandi Soal Kasus Hukum

JAKARTA - Pembangunan stadion di atas lahan Taman BMW (Bersih Manusiawi Wibawa), Jakarta Utara, diprediksi mencapai angka Rp 2 triliun. Melihat besarnya anggaran yang dibutuhkan membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berpikir dua kali untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dia lebih memilih menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk membangun stadion bertaraf internasional tersebut. "Sudah banyak badan usaha yang tertarik untuk membangun stadion di Taman BMW. Jadi dana APBD bisa dialokasikan untuk program lain. Kami fokuskan buat warga masyarakat yang termarginalkan, warga masyarakat yang selama ini belum tersentuh," ujar Sandi, Senin (27/11).

Sandi menjelaskan, pihak badan usaha banyak yang berminat, begitu mendengar Pemprov DKI menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha untuk membangun stadion BMW. "Sekarang aja begitu kami mau launching, sudah banyak yang tertarik, mau masuk bekerja sama dengan pemerintah," kata Sandi.

Dia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang tidak menganggarkan dana untuk membangun stadion di Taman BMW dalam rancangan RAPBD DKI 2018. Dalam situs apbd.jakarta.go.id, hanya ada dua nomenklatur terkait kajian stadion di Taman BMW ■

Pertama, penyusunan final business case pembangunan stadion bertaraf internasional dengan anggaran Rp 15,9 miliar. Tolak ukur kinerjanya adalah tersedianya dokumen detail engineering design pembangunan stadion bertaraf internasional.

Kedua, penyusunan pra-studi kelayakan pembangunan stadion olahraga bertaraf internasional dengan dana Rp 2,9 miliar. Tolak ukur kinerjanya adalah tersedianya dokumen prastudi kelayakan pembangunan stadion bertaraf internasional. Jika ditotal, anggaran untuk dua kajian itu Rp 18,99 miliar.

Di sisi lain, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto teru menyoroti persoalan lahan Taman BMW. Ia mengatakan, Anies-Sandi sudah mengantongi data dan persoalan Taman BMW.

Dia mengatakan, konsistensi menjaga marwah hukum Anies-Sandi juga tampak

dipersoalan rencana membangun stadion olah raga di atas tanah taman BMW di Kelurahan Papango Jakarta Utara.

Janji kampanye akan membangun stadion olah raga sebagai pengganti Stadion Lebak Bulus yang digunakan MRT semasa gubernur sebelumnya, ditunggu masyarakat Jakarta. Stadion bertaraf internasional dengan fasilitas layaknya Stadion Old Trafford, markas klub Manchester United sedang dirancang. "Pembangunannya direncanakan

dengan pola kemitraan dengan swasta, kata Sandiaga Uno," terang Prijanto.

Namun, dalam menjaga marwah hukum sebagaimana yang ditekankan oleh Trio Macannya DKI, yakni Anies-Sandi-Sudirman Said dalam berbagai kesempatan, sambung Prijanto, tampak jelas Pemprov DKI sangat berhati-hati dalam membangun stadion olahraga tersebut.

Pada 8 Agustus 2017, Dr. Yurisman Star, Ketum LSM Snak Markus (Solidaritas Nasional Anti Korupsi dan Makelar Kasus) diundang oleh Sandiaga Uno untuk memaparkan persoalan tanah taman BMW, di hadapan timnya.

Misteri Sertifikat Tanah Taman BMW Sepeninggal Gubernur Djarot, Pemprov DKI sudah memiliki 6 (enam) sertifikat taman BMW. Diperoleh informasi, sertifikat P.250/Papango 72.858 M2, P.251/Papango 35.098 M2, P.314/Papango 29.256 M2, P.315/Papango 66.999 M2, P.508/Sunter Agung 30.245 dan P.509/Sunter Agung 28.841 M2. Sertifikat nomor P.250 dan P.251 terbit saat Gubernur Jokowi dan 4 sertifikat lainnya terbit saat Gubernur Djarot.

Melihat gambar letak tanah dan luas dalam sertifikat, patut diduga data yang digunakan Pemprov DKI dalam memo-hon, menggunakan Surat Hak Pakai tahun 2003 yang sudah dinyatakan gugur demi hukum (Ref. Surat Kakanwil BPN Jakarta kepada Jaksa Agung Muda Intelijen tahun 2009).

Terbitnya sertifikat taman BMW mem-

bawa misteri, yang patut diduga adanya pemaksaan kehendak dengan menabrak hukum. Bagaimana mungkin alas hak tanah tidak jelas dan sedang dalam sengketa di Pengadilan bisa keluar sertifikat? Hal ini jelas melanggar PP No.24/1997 dan PMNA No.3/1997. Konon dilingkungan pegawai BPN sendiri juga ada yang menyetesalkan, karena

gegabah.

Sertifikat bukanlah segalanya. Pendaftaran tanah di Indonesia menganut azas 'stelsel negatif'. Artinya, terdapatnya nama seseorang di dalam register bukanlah berarti 'absolute' menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan pihak lain. Di sisi lain tidak ada tanah yang tidak ada pemiliknya.

Beberapa kasus tanah, Pemprov DKI digugat dan kalah dipengadilan, walau sudah mengantongi sertifikat. Disinilah Anies-Sandi tertantang, akankah mereka berdua akan menerima sertifikat yang patut diduga bermasalah?

Dengan jargon menjaga marwah hukum dan memberikan kepastian hukum, Anies-Sandi jelas tidak akan gegabah membangun Stadion Olah Raga di atas tanah bermasalah. Persoalan taman BMW sudah diketahuinya, sejak mereka berdua belum dilantik.

Menurut Prijanto, tim hukum Sandi selesai mendengarkan paparan Snak Markus memberikan kesimpulan "Tanah taman BMW bukan milik DKI

dan juga bukan milik PT. Agung Podomoro". Tim hukum Sandi patut diacungi jempol atas kecerdasannya dalam memahami persoalan.

"Kiprah Anies-Sandi dalam menegakan hukum dan melindungi hak-hak rakyat sangat ditunggu rakyat Jakarta. Setelah mempelajari dan mengetahui bahwa dokumen yang ada di markasnya Pemprov DKI tidak ada yang mendukung keabsahan sertifikat, akankah Gubernur Anies akan memohon pembatalan sertifikatnya sendiri kepada Ka BPN RI?," tanya Prijanto.

Langkah tersebut memang belum lazim, tetapi lanjut Prijanto, itulah karakter yang ditunggu rakyat. Bukan ada udang di balik batu, tetapi semata-mata ingin meluruskan dan mendirikan stadion untuk rakyat Jakarta di atas tanah yang halal, sehingga diridhoi Allah SWT sesuai keyakinannya.

Anies-Sandi tidak ingin membuat sejarah membangun stadion olah raga, tetapi kelak digugat di Pengadilan dan kalah. Putusan Pengadilan stadion harus dibongkar dan harus ganti rugi kepada pemilik tanah.

Prijanto menambahkan, tidak mungkin Anies-Sandi ngotot jika dokumennya

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Siap Bangun Stadion BMW

tidak beres, mengingat mereka dengan keras menegakan berdirinya bangunan di atas pulau reklamasi tanpa dokumen yang sah. "Itulah konsistensi Anies-Sandi dalam menjaga marwah hukum. Insha Allah," tandas Prijanto. (wok)



* Kasus taman BMW sudah masuk KPK sejak 3 September 2012. Sudah ada di bagian Penindakan KPK (Surat KPK Nomor : R-4160/40-43/10/2012, tanggal 31 Oktober 2012).

* Kasus taman BMW sudah menjadi temuan BPK (LHP BPK RI 2014 dan sudah di PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) oleh BPK RI tahun 2015).

* Taman BMW bukan hasil konsinyasi dari PT. Narpati Estate dan PT. Buana Permata Hijau (Surat Keterangan Carnat Tanjung Priok No.91/1.711.1/1985, Putusan No. 160/G/1991/Tn/PTUN-JKT, Penetapan No.03/Cons/1994/PN Jkt Ut).

* SK Hak Pakai dari Kakanwil BPN tahun 2003 sejumlah 7 SK Hak Pakai, sudah gugur demi hukum karena hanya berlaku 3 bulan dan tidak ada alas hak tanahnya (Surat Kakanwil BPN DKI kepada Jaksa Agung Muda Intelijen No.1055/0-9/PPS & KR/2009).

* Berita Acara Serah Terima tentang penyerahan kewajiban PT. Agung Podomoro kepada Pemprov DKI tanah seluas 265.335,99 m2 dan menunjuk taman BMW sebagai obyek, pada 8 Juni 2007, patut diduga bodong dari sisi letak, luas dan keabsahan SPH (Surat Pelepasan Hak) karena rakyat mengaku tidak punya tanah dan tanda tangan di SPH bukan tanda tangannya.

ANGGA GUMELARANDOPOS